

# IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN BERKELANJUTAN INSEMINASI BUATAN DAN GANGGUAN REPRODUKSI SAPI PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PINRANG

A. Nurfadilah Makmur<sup>1\*</sup>, Anwar Parawangi<sup>2</sup>, Samsir Rahim<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

## Abstract

*This study purposed to find out the implementation of the Sustainable Service program for Artificial Insemination and Cattle Reproduction Disorders at the Livestock and Plantation Service Office of Pinrang Regency. This study used qualitative methods by conducting data collection techniques through observation and interviews. The data obtained from the research results were examined using data reduction techniques, data presentation, and making conclusions. The results showed that the aspects of (1) communication with the formation of an insemination service team that always coordinated with each other in determining the program implementation strategy. (2) The service team consisted of experts who were competent in handling insemination for resources in implementing artificial insemination and reproductive disorders. (3) Disposition was the attitude of the implementers of artificial insemination and reproductive disorders services who were truly committed to carrying out insemination activities by always conducting deliberations in carrying out. (4) the bureaucratic structure could be seen from the division of labor of each insemination service team so that the implementation of services was carried out in stages.*

**Keywords:** policy implementation, artificial insemination, animal husbandry

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi Pada Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikaji dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek (1) Komunikasi dengan terbentuknya tim pelayanan inseminasi yang senantiasa saling berkoordinasi dalam menentukan strategi pelaksanaan program. (2) sumber daya dalam pelaksanaan inseminasi buatan pelayanan terdiri dari tenaga ahli yang berkompeten dalam inseminasi (3) disposisi merupakan sikap dari pelaksana pelayanan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi yang benar-benar berkomitmen dalam menjalankan kegiatan inseminasi dengan senantiasa melakukan musyawarah dalam melaksanakan kegiatan. (4) struktur birokrasi terlihat dari pembagian kerja dari setiap tim pelayanan inseminasi sehingga pelaksanaan pelayanan terlaksana secara bertahap.

**Kata kunci:** implementasi kebijakan, inseminasi buatan, peternakan

---

\* anurfadilahmakmur@gmail.com

## PENDAHULUAN

Sapi merupakan ternak yang umum dipelihara dan beternak sapi merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat pedesaan. Sapi biasanya dipelihara untuk diambil tenaga, daging, dan susunya. Di Indonesia terdapat beberapa sapi lokal yang memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap pakan yang berkualitas rendah, sistem pemeliharaan ekstensif dan memiliki daya tahan terhadap penyakit ektoparasit. Bangsa sapi yang ada di Indonesia diantaranya adalah Sapi Bali, Sapi Pesisir, Sapi Madura dan Sapi Aceh.

Pada umumnya peternakan di Pinrang masih tradisional. Hewan ternak dilepas begitu saja, dan peternakan sapi sebagai usaha sampingan (*second income*). Dalam kondisi tersebut, sapi betina induk hanya mampu beranak 2-3 ekor dalam 5 tahun. Pinrang termasuk wilayah sentra pengembangan sapi di Provinsi Sulawesi Selatan. Meski demikian perkembangan populasi ternak sapi di daerah ini masih dirasakan belum maksimal, sementara letak geografis dan sumberdaya alam Kabupaten Pinrang berpotensi dalam pengembangan usaha ternak sapi (Dinas

Peternakan Dan Perkebunan Kab. Pinrang).

Faktor lain yang menyebabkan terhambatnya peningkatan populasi adalah adanya penyakit gangguan reproduksi. Penyakit ini dapat mengakibatkan rendahnya kemampuan reproduksi untuk menghasilkan anak. Kurang terkontrolnya sistem perkawinan alam, penyebab utama dari penyakit ini. Sapi yang dipelihara dengan sistem dilepas berpeluang besar terhadap penularan penyakit gangguan reproduksi.

Melalui Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang di tahun 2015 membangun inovasi yang dinamakan Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi (Pelan Itu Bagus). Hal ini cukup unik, karena pelayanan dilakukan 21 hari berturut-turut dalam satu kelompok ternak. Hal itu disesuaikan dengan 21 hari siklus birahi sapi, sebagai syarat utama dalam keberhasilan pelaksanaan inseminasi buatan. pelayanan 21 hari secara terus menerus, maka sapi induk yang tidak bunting secara keseluruhan dapat terinseminasi. Begitu pula dengan sapi induk yang terindikasi mengalami gangguan reproduksi dapat disembuhkan dengan pengobatan yang intensif, untuk selanjutnya dilakukan

inseminasi setelah injeksi hormon perangsang birahi.

Pelayanan berkelanjutan dilakukan oleh petugas teknis peternakan yang tergabung dalam satu tim, terdiri dari dokter hewan, asisten teknis reproduksi, pemeriksa kebuntingan, inseminator, dan petugas peternakan kesehatan hewan kecamatan. Tim Pelayanan bertugas memeriksa kebuntingan, pengelompokan sapi induk berdasar kepada induk bunting, tidak bunting, beranak dibawah dua bulan, dan sapi induk yang terindikasi mengalami gangguan reproduksi.

Berdasarkan data awal yang dihimpun penulis dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang setelah pelaksanaan program pelan itu bagus melalui inseminasi buatan maka terjadi peningkatan yang di paparkan sebagai berikut berikut: tahun 2015 (4.045 ekor), tahun 2016 (5.897 ekor) Tahun 2017 (7.993 ekor)

Inseminasi buatan adalah proses perkawinan berdasarkan campur tangan manusia. Inseminasi buatan dilakukan dengan mempertemukan sel sperma dan sel telur agar dapat terjadi pembuahan. Teknologi inseminasi buatan dimaksud agar dapat di peroleh hasil secara efektif dan efisien dalam penggunaan pejantan terpilih, menghindari terjadinya penyebaran penyakit melalui sarana

reproduksi, dan mengatasi bila terjadi kendala dalam perkawinan antara si jantan dan betina.

Sebagai bangsa yang masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani dan variannya seperti peternak, maka keberadaan hewan ternak merupakan potensi ekonomi masyarakat yang terus dipacu perkembangannya, sehingga berbagai program swasembada pangan menjadi prioritas pembangunan di daerah-daerah yang memiliki potensi peternakan hewan, yang tentunya berbasis pada masyarakat yang menjadi tulang punggung pembangunan daerah.

Hewan ternak yang menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat di Daerah akan berdampak baik dan positif apabila dalam pelaksanaannya dikelola secara teratur dan tertib. Akan tetapi menimbulkan persoalan kemasyarakatan ketika hewan ternak mengalami kesehatan reproduksi sehingga dapat berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menjawab persoalan tersebut adalah dengan melakukan Inseminasi Buatan (IB). Inseminasi buatan (IB) berbeda dengan kawin alam, dalam pengertian bahwa ejakulasi semen tidak didepositkan dalam vagina betina, tetapi dalam vagina buatan. Semen diproses

dan dikemas serta pada akhirnya dimasukkan ke sejumlah betina.

Pemerintah Kabupaten Pinrang mengapresiasi ide inovasi ini dan selanjutnya dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan dan telah direplikasi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang. Pemerintah menyadari bahwa pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Pinrang. Wujud dari keseriusan Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam bidang pembangunan, yaitu dengan menciptakan program pemberdayaan masyarakat.

Salah satunya dengan program inovasi pelayanan berkelanjutan, yakni inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang merujuk dari beberapa dasar hukum yaitu Peraturan Bupati Pinrang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi

dan Kerbau Betina Bunting serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 656/Kpts/OT.050/10/2016 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.

Kegunaan atau manfaat dari program pemberdayaan ini lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan daging yang ada di Kabupaten Pinrang serta mempermudah para peternak sapi untuk mewujudkan tujuan dari Program Pelan Itu Bagus (Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi) yang notabene sangat membantu perekonomian warga di Kabupaten Pinrang dalam hal ini para peternak sapi (Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang 2020).

Inseminasi buatan atau kawin suntik pada budidaya sapi perah dan potong sudah dikenal di Indonesia sejak 1976. Meski demikian, teknik memasukkan semen beku yang telah dicairkan untuk meningkatkan reproduksi ini berkontribusi menyebabkan timbulnya gangguan kesuburuan pada sapi.

Munculnya gangguan reproduksi pada sapi ini, disebabkan oleh pelaksanaan inseminasi buatan yang kurang sesuai dengan aturan. Sehingga menyebabkan kasus *anestrus* (tidak

birahi), *repeat breeding* (kawin berulang), dan *nimfomania* (birahi terus menerus) pada sapi di kemudian hari.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan program pelan itu bagus adalah kurangnya tenaga ahli yang memahami inseminasi buatan. Kesalahan inseminasi di lapangan dikarenakan pelaksanaannya kebanyakan bukan dari kalangan praktisi dokter hewan. Karena jumlah dokter hewan yang masih sangat terbatas. Disamping itu, pelaksanaan inseminasi di lapangan juga tidak didukung dengan prasarana yang menunjang, seperti kondisi sanitasi yang kurang baik.

Impelementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia mengartikan implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan, sedangkan pengertian implementasi dalam artian umum merupakan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu program yang sudah di rencanakan dengan matang yang disusun secara teliti.

Mulyadi (2015:12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai

perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (Taufik dan Israil, 2013: 136) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan dalam keputusan sebelumnya, tindakan ini mencakup usaha-usaha dalam mengubah suatu keputusan menjadi sebuah tindakan-tindakan pada jangka waktu tertentu, serta dalam rangka melanjutkan aktivitas dalam mencapai perubahan besar maupun kecil yang sudah ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh suatu organisasi publik yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Harsono (2002:67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu

kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan. Sulistyastuti (2012:21) menyebutkan implemementasi kebijakan sebagai sebuah proses , serangkaian keputusan dan tindakan penting yang diarahkan dalam penetapan keputusan oleh pemerintah yang memiliki dampak dari keputusan tersebut.

Dari penjelasan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan bisa dimulai sebelum semua tujuan dan sasaran kebijakan yang sudah diidentifikasi ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi Implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok organisasi untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan telah rencanakan.

Edward III berpendapat bahwa keberhasilan Implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat faktor Subarsono (2011:90-92) Yaitu : 1) Komunikasi, Keberhasilan suatu implementasi

kebijakan dipengaruhi oleh seorang implementor. 2) Sumber daya, jika implementor mengalami kekurangan sumber daya walaupun isi semua kebijakan sudah disampaikan dengan jelas dan konsisten oleh implementor, maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. 3) Disposisi, disposisi merupakan karakter yang dimiliki seorang implementor seperti kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis. 4) Struktur Birokrasi, apabila struktur organisasi terlalu penjang maka birokrasi akan mengalami prosedur yang rumit dan kompleks, oleh karena itu struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* dan *Fragmentasi*.

Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengakapi dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu Widodo (2011).

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Menurut

Dunn (2003:132) implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.

Usaha peternakan merupakan suatu proses pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong perubahan struktur ekonomi suatu wilayah. Proses teknologi dan inovasi tersebut mengubah struktur ekonomi suatu wilayah.

Sektor peternakan adalah sektor yang memberikan kontribusi tinggi dalam pembangunan pertanian. Sektor ini memiliki peluang pasar yang sangat baik, dimana pasar domestik akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Semakin meningkatnya pendapatan penduduk maka permintaan produk-produk peternakan mengalami peningkatan Rusidiana (2011).

Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Usaha pemeliharaan ternak disebut sebagai peternakan dan merupakan bagian dari kegiatan pertanian secara umum. Adapun jenis-jenis ternak diantaranya sapi, kerbau,

domba, kambing, kelinci, ayam, itik, mentok, puyuh, ulat sutera, belut, dan ternak lebah madu. Masing-masing hewan ternak tersebut dapat diambil manfaat dan hasilnya. Hewan-hewan ternak ini dapat dijadikan pilihan untuk dternakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Kebijakan Pembangunan Peternakan Paradigma pembangunan peternakan adalah terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif serta kreatif melalui peternakan tangguh berbasis sumberdaya lokal.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dengan tipe penelitian pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mendeskripsikan teori Edward III, menggunakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang Pengembangan Ternak Sapi.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang

diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Adapun lokasi pada penelitian ini yaitu di Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang.

Peneliti ini menentukan informan penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling, dengan mengambil informan dengan jumlah informan 11 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahan data yang digunakan yakni uji triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Pinrang terletak di ujung utara bagian barat dari Wilayah propinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis terletak antara 3019'13"- 4010'30" Lintang Selatan (LS) dan 119026' 30" – 1190 47' 20" Bujur Timur (BT). Kabupaten Pinrang terletak dibagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten ini dibatasi:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidenreng Rappang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kotamadya Parepare. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar (Sulbar) dan Selat Makassar.

Berdasarkan catatan badan klimatologi, rata-rata suhu Kecamatan Libureng umumnya sekitar 28,5°C serta suhu minimum 25,6°C dan dengan suhu maksimum 28°C. Kecamatan Libureng memiliki iklim tropis serta mempunyai 2 musim yakni musim kemarau serta musim hujan, Kecamatan Libureng memiliki 20 desa.

Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 sebanyak 372.230 jiwa yang terdiri dari 180.586 jiwa penduduk laki-laki dan 191.644 penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 sekitar 189,7 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Watang Sawitto yaitu sekitar 1.076 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Lembang yaitu sekitar 54 jiwa/km.

Sektor Pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Pinrang. Pada tahun 2017,

berkontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB sebesar 48,67 persen. Bidang Peternakan seperti sapi potong, kerbau, kuda, kambing/domba, ayam dan itik. Populasi ternak pada tahun 2017 sebanyak 2.779.625 ekor, terdiri dari 1.746.790 ekor ayam ekor ayam petelur dan 251.535 ekor ayam pedaging.

Kebutuhan pangan masyarakat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan ataupun program yang mengarah kepada ketersediaan pangan dalam suatu wilayah. Kebutuhan pangan tidak hanya berasal dari tumbuh-tumbuhan namun juga dari hewani seperti peternakan. Kebutuhan gizi masyarakat harus seimbang yang di topang dengan ketersediaan protein, zat gizi dan lemak yang banyak terdapat pada konsumsi pangan hewani.

Dalam menjaga ketersediaan tersebut pemerintah Sulawesi Selatan mendorong program upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting agar kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari hewan ternak selalu tersedia. Melalui program Pelan Itu Bagus yang di inisiasi oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang dengan menjaga ketersediaan pangan yang berasal dari peternakan sapi dengan metode inseminasi buatan (IB) agar

reproduksi sapi dapat terjaga dengan baik.

### **Komunikasi**

Komunikasi yaitu proses dalam menyampaikan pesan yang melibatkan orang banyak, karena komunikasi orang dapat berusaha untuk saling mengenal. Komunika sendiri tidak hanya seputar antara individu dengan kelompok, individu dengan individu, maupun kelompok dengan kelompok akan tetapi komunikasi dapat dimanfaatkan oleh segala macam kalangan, contohnya organisasi yang akan mensejahterakan masyarakat pada umumnya. Komunikasi yang baik akan sangat memerlukan suatu strategi dalam berkomunikasi yang kemudian akan menimbulkan timbal balik atau respon yang diharapkan.

Seperti komunikasi yang diungkapkan oleh Effendy (Wahab, 2015) bahwa suatu strategi dalam berkomunikasi adalah suatu gabungan antara perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi, keduanya dimanfaatkan di dalam pencapaian tujuan. Sedangkan untuk penyuluhan dapat memberikan perencanaan komunikasi yang selanjutnya dapat digunakan untuk pencapaian tujuan.

## **Sumber Daya**

Sumber daya merupakan penggerak jalannya sebuah organisasi. Begitu juga dalam sebuah bisnis ataupun perusahaan, maju mundurnya sebuah institusi pemerintah ditentukan oleh besaran sumber daya manusianya. Sehingga sumber daya manusia atau pegawai dalam organisasi pemerintahan menjadi perhatian penting dalam usaha mencapai tujuan pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pemerintah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDM dengan biaya terjangkau dilakukan pemerintah daerah dengan perbaikan secara terus-menerus baik dalam bidang administrasi dan pelayanan sehingga kinerja pegawai pemerintah dapat maksimal.

Kebutuhan pelayanan inseminasi buatan dari peternak sapi yang semakin meningkat tidak di dukung dengan ketersediaan kelompok pemberi pelayanan inseminasi buatan yang hanya berjumlah empat kelompok. Beberapa peralatan yang dibutuhkan juga terlebih dahulu harus di koordinasikan dengan pemerintah pusat. Sementara itu dalam memperhatikan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsinya para petugas lapangan telah

di berikan bimbingan teknis dengan demikian peningkatan hasil produksi dari peternakan sapi dapat berjalan dengan baik.

## **Disposisi**

Pada dasarnya implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.

Sikap aparatur yang benar-benar membangun komitmen dalam upaya peningkatan hasil produksi dari peternakan sapi di Kabupaten Pinrang di lihat dari menurunnya kasus penyakit gangguan reproduksi dari peternakan sapi, hal tersebut tidak terlepas dari keseriusan pemerintah dalam melaksanakan program pelan itu bagus.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait disposisi atau sikap pelaksana pada implementasi program pengembangan ternak sapi dalam meningkatkan produksi peternakan sapi di kabupaten Pinrang dapat dilihat dari sikap dalam mengambil keputusan yang senantiasa melalui proses musyawarah sehingga

proses pelayanan inseminasi buatan dapat berjalan secara bertahap sesuai dengan fungsi dari tim pelayanan inseminasi dilapangan. Dengan menurunnya kasus penyakit reproduksi terhadap ternak sapi setiap tahunnya merupakan bukti nyata bentuk komitmen dari pemerintah daerah dalam upayanya meningkatkan hasil produksi peternakan sapi dan juga melalui peningkatan kesadaran peternak dengan antusias mendukung program pelayanan inseminasi buatan tersebut.

### **Struktur Birokrasi**

Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Pelaksanaan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi di Kabupaten Pinrang dilaksanakan berdasarkan

standar operasional kerja sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan provinsi, sehingga dalam pelaksanaannya dilapangan akan mudah di pahami baik oleh tim inseminator yang sudah memiliki tugas dan fungsi yang jelas dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait struktur birokrasi pada implementasi program pengembangan ternak sapi dalam meningkatkan produksi peternakan sapi di kabupaten Pinrang terlaksana sesuai dengan arahan yang tertuang dalam standar operasional kerja oleh dinas peternakan dan perkebunan Kabupaten Pinrang sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang berbentuk surat keputusan sehingga tim yang terbentuk memiliki fungsinya masing-masing dalam memberikan pelayanan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sebagai langkah nyata meningkatkan produksi peternakan sapi di Kabupaten Pinrang.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Komunikasi, perilaku level bawah membutuhkan berbagai masukan secara aktualisasi dari dinas perkebunan dan peternakan Kabupaten Pinrang dalam mengkoordinasikan program ini sebagai

program yang harus teraktualisasikan pada level bawah. Melalui koordinasi yang dilakukan oleh pihak penyuluh di bidang peternakan dapat meningkatkan hasil peternakan. (2) Sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana peternakan mendukung proses inventarisasi, identifikasi pengembangan dan pembinaan teknis sehingga program peningkatan populasi ternak dan penurunan prevalence penyakit gangguan reproduksi pada ternak sapi di Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan. (3) Disposisi sikap dari aparat yang bertugas di lapangan antara petugas kebuntingan dan petugas inseminasi buatan dengan benar-benar bekerja sesuai dengan juklak Pelan Itu Bagus dapat meningkatkan populasi ternak sapi di Kabupaten Pinrang. (4) Struktur Birokrasi melalui kerjasama antar organisasi dan mengembangkan berbagai kepentingan antar organisasi dapat mewujudkan terlaksananya inseminasi buatan pada peternakan sapi yang dapat mengurangi masalah reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang.

#### DAFTAR PUSTAKA

Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Harsono, H. (2002). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, D. (2015), *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, A. E dan Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Widodo, J. (2011). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media.
- Taufik, M. dan Isril. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*. Volume 4(2). 135-140.
- Rusidiana. (2011). *Analisis Ekonomi Penggemukan Sapi Perah Berbasis Tanaman Ubi Kayu Di Pedesaan*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Peternakan. Bogor.